

Pedoman Tata Kelola Perseroan

Terbitan 2021

Referensi Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
5. Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 /POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pengguna Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
37. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
38. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
39. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. No. 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.tanggal 30 Juni 2020.
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9 /SEOJK.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
44. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
45. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
46. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
47. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 Septeber 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon PSP, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
48. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
49. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
50. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
51. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
52. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
53. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
54. Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
55. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
56. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep.00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
57. Anggaran Dasar Perseroan.
58. Kode Etik Perseroan.
59. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter).

Latar Belakang

Dengan telah dikeluarkannya beberapa regulasi yang di antaranya mencabut peraturan yang menjadi dasar penyusunan Manual GCG tahun 2012, 2015, 2017, dan 2018 maka tahun 2021 Perseroan memandang perlu untuk menyesuaikan Manual GCG atau untuk selanjutnya disebut

“Pedoman Tata Kelola Perusahaan” berdasarkan ketentuan regulasi terbaru serta sumber nilai-nilai etis yang berkembang dalam praktek.

Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Kelola ini merupakan acuan bagi Perseroan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka:

1. Mendorong pengelolaan Perseroan yang didasarkan kepada asas tata kelola perusahaan yang baik, yakni:
 - transparansi (*transparency*),
 - akuntabilitas (*accountability*),
 - tanggung jawab (*responsibility*), dan
 - independensi (*independency*), dan

- kewajaran (*fairness*).
- 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
- 3. Mendorong Perseroan untuk membuat keputusan dan tindakan yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan (*comply*) terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4. Mengoptimalkan nilai (*value*) Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.
- 5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*).

Cakupan

Pembahasan Pedoman Tata Kelola Perseroan antara lain mencakup:

Bab	Perihal
Bab 1	Ketentuan Umum (Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Visi Misi, Tata Nilai dan Kode Etik)
Bab 2	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Bab 3	Dewan Komisaris
Bab 4	Direksi
Bab 5	Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal
Bab 6	Fungsi Komunikasi dan Informasi
Bab 7	Penerapan Manajemen Risiko
Bab 8	Strategi Anti Fraud
Bab 9	Keterbukaan Informasi
Bab 10	Rencana Strategis Perseroan
Bab 11	Transaksi Orang Dalam
Bab 12	Pembagian Dividen
Bab 13	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
Bab 14	Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) & Laporan Tahunan

Kontak Kami

Untuk pedoman versi lengkap atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

**Divisi Corporate Secretary PT
Bank Central Asia Tbk**
 Menara BCA Lantai 20, Jl.M.H. Thamrin No. 1
 Menteng, Jakarta Pusat
 No. telp. 62 21 235 88000 ext 20224 atau 20255
 No. fax. 62 21 235 88300